

RENCANA STRATEGIS

2017-2022



*Sumber Foto : Eric Sidniyanto, 2018



Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	2
DAFTAR TABEL	3
BAB 1.....	4
Pendahuluan.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.2 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB 2.....	9
Gambaran Pelayanan Dinas Kehutanan.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.2.1 Sumber Daya Manusia	19
2.2.2 Asset/Modal.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan	22
2.3.1 Capaian Indikator Kinerja.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan	26
BAB 3.....	29
Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kehutanan.....	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ...	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	29
3.3 Telaahan Renstra K/L	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	36
BAB 4.....	37
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan	37
BAB 5.....	40
Strategi dan Arah Kebijakan	40
BAB 6.....	42
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	42
BAB 7.....	56
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kehutanan	56
BAB 8.....	58
Penutup	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Penyusunan Rencana Strategis SKPD	5
Gambar 2. TPU Karet dan Taman Layangan adalah salah satu contoh RTH yang dikelola Dinas Kehutanan.....	9
Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sesuai Pergub Prov. DKI Jakarta No.280 Tahun 2016 tentang SOTK Dinas Kehutanan.....	18
Gambar 4. Salah satu kendaraan Operasional Dinas Kehutanan.....	21
Gambar 5. Kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenasah dan pelatihan Pertamanan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan.....	26
Gambar 6. Pengadaan Peralatan Kerja sebagai pendukung kinerja aparatur Dinas Kehutanan ...	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.....	19
Tabel 2. Asset tidak bergerak Dinas Kehutanan per Tahun 2017	20
Tabel 3. Asset bergerak Dinas Kehutanan per Tahun 2017	22
Tabel 4. Realisasi Luas RTH yang dikelola Dinas Kehutanan per 2017	23
Tabel 5. Target dan Realisasi Kinerja Program Dinas Kehutanan 2012-2017	23
Tabel 6. Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan 2013-2017	25
Tabel 7. Analisa Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan	27
Tabel 8. Identifikasi permasalahan Dinas Kehutanan	29
Tabel 9. Kajian Telaahan Renstra Kementerian LHK disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan.....	34
Tabel 10. Kajian Telaahan Renstra Kementerian ATR disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan	34
Tabel 11. Kajian Telaahan RTRW Provinsi DKI Jakarta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan	35
Tabel 12. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan	39
Tabel 13. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah	40
Tabel 14. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan 2017-2022.....	42
Tabel 15. Target Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta 2017-2022	56
Tabel 16. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.....	57

BAB 1

Pendahuluan



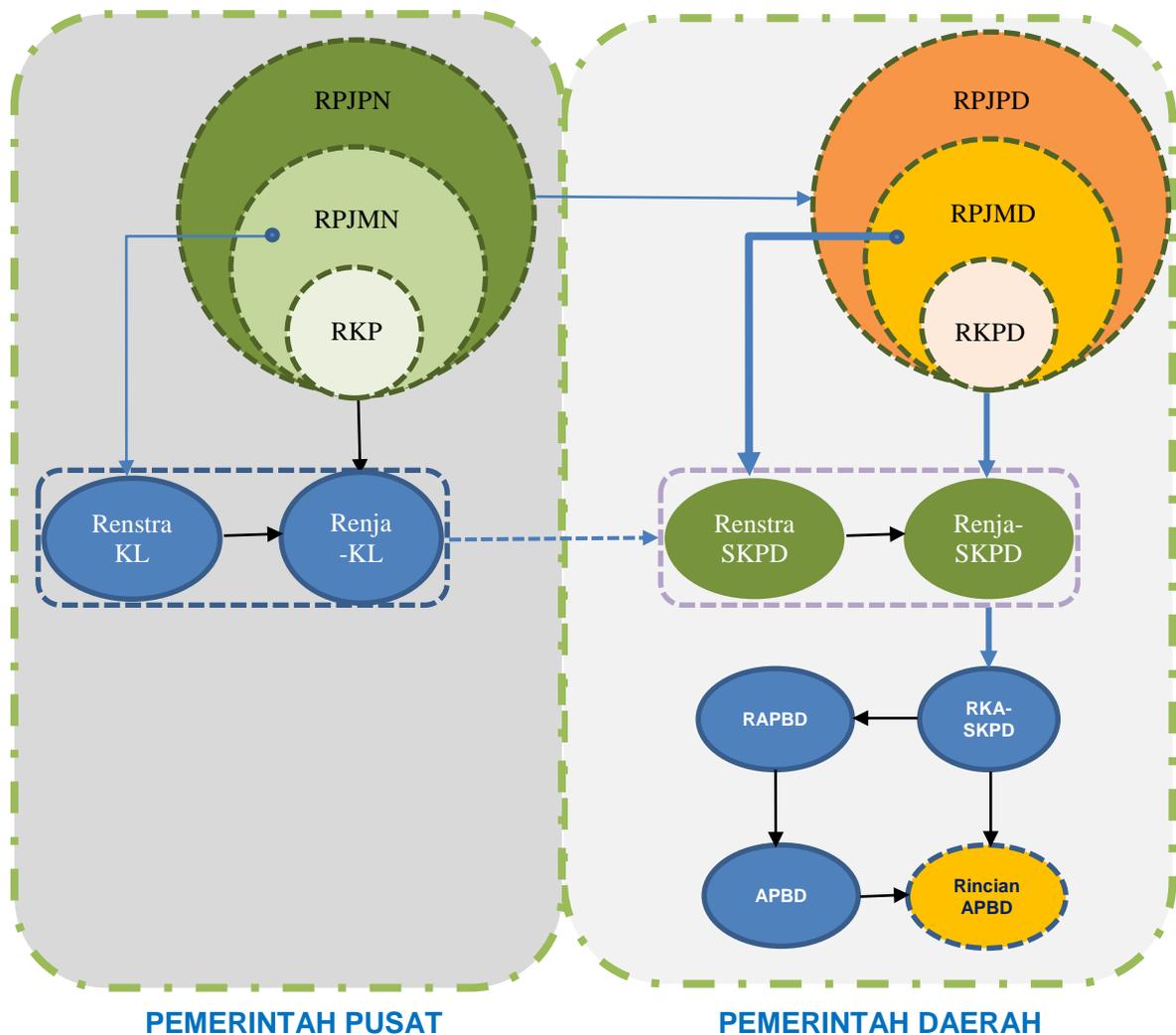
1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah dalam upayanya untuk meningkatkan dan lebih pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, dan lapangan berusaha, serta diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai kewenangannya. Pembangunan daerah yang dilaksanakan tersebut harus sudah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dimana di dalam pembangunan itu, Pemerintah Daerah harus melibatkan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing dan didasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah tersebut. Untuk bisa mengakomodir prinsip-prinsip pembangunan itu maka perlu dibuat sebuah perencanaan pembangunan daerah yang matang. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan kepada setiap Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berkoordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) berfungsi sebagai dokumen kerja Kepala SKPD untuk masa kerja lima tahun mendatang, Kepala SKPD harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dokumen perencanaan ini kepada Gubernur serta akan menjadi acuan bagi Lembaga audit internal dan eksternal dalam menilai kinerja SKPD. Sebagai sebuah dokumen perencanaan lima tahunan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan merupakan penjabaran arah kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 untuk urusan kehutanan dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan

itu sendiri, dimana didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk urusan Kehutanan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi DKI Jakarta yang seirama dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), SDGs, KLHS serta Renstra Kementerian/Lembaga yang terkait.



Gambar 1. Bagan Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Tahapan Umum (Proses) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra
 - a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
 - b. Penyusunan Agenda Kerja, terdiri atas:
 - Penetapan tim penyusunan renstra
 - Penyusunan rancangan awal renstra
 - Penyusunan rancangan renstra
 - Pelaksanaan forum perangkat daerah
 - Penyusunan rancangan akhir
 - Penetapan renstra
 - d. Penyiapan Data dan Informasi

- Data capaian kinerja perangkat daerah 5 tahun terakhir
- Data statistik yang berkaitan dengan urusan SKPD
- Data demografi pegawai perangkat daerah
- Data asset dan keuangan perangkat daerah
- Hasil evaluasi renstra periode 2012-2017
- Kebijakan nasional yang berkaitan dengan urusan perangkat daerah
- Hasil evaluasi RPJMD periode 2012-2017

2. Tahap Penyusunan Renstra SKPD

a. Rancangan Awal Renstra

penyusunan rancangan awal Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal renstra dapat disebut sebagai penyusunan teknokratik Renstra oleh perangkat Daerah. SKPD secara mandiri menentukan isu-isu strategis perangkat daerah yang digunakan untuk menentukan tujuan SKPD.

b. Rancangan Renstra

beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahapan ini adalah:

- Tim Penyusun Renstra menyelaraskan rancangan awal renstra dengan rancangan awal RPJMD
- Perangkat Daerah menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah dan Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- Menyelaraskan rancangan awal renstra dengan berita acara forum perangkat daerah/lintas daerah.
- Menyerahkan dokumen renstra ke Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk diverifikasi.
- Menyempurnakan rancangan renstra sesuai dengan rekomendasi Bappeda.

c. Rancangan akhir Renstra

Penyusunan rancangan akhir renstra merupakan penyempurnaan rancangan renstra. Penyempurnaan didasarkan pada dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan akhir renstra :

- Keselarasan strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah dengan arah strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan RPJMD;
- Menyelaraskan kegiatan dengan target indikator program;
- Merumuskan tingkatan indikator kinerja pada jabatan eselon III dan Eselon IV;
- Menyerahkan rancangan akhir renstra ke Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk diverifikasi setelah perda RPJMD ditetapkan;
- Menyempurnakan rancangan akhir renstra sesuai dengan rekomendasi Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

d. Penetapan Renstra

Rancangan akhir renstra SKPD yang telah disempurnakan akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030;
8. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 280 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan;
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 401 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 402 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 404 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Tanah Kehutanan;
16. Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta 34/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Tahun 2017 -2022 adalah sebagai berikut ;

a. Maksud

Maksud pembuatan Renstra Dinas Kehutanan adalah menjabarkan detail program yang sudah ditetapkan didalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan daerah khususnya urusan Kehutanan
2. Sebagai Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kehutanan
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD
4. Sebagai kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Gubernur (jika dibutuhkan)
5. Sebagai bahan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kehutanan 2017-2022 ini terdiri dari 8 (delapan) bagian sesuai dengan SE Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34/SE/2017, yaitu:

BAB I Pendahuluan

mencakup : Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

mencakup: Tugas; Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD; Sumber Daya SKPD yang terdiri atas SDM; Aset/Modal; Kinerja Pelayanan SKPD yang terdiri atas Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis SKPD

mencakup: Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi SKPD; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah; Telaahan Renstra K/L; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB 2

Gambaran Pelayanan Dinas Kehutanan



Dinas Kehutanan terbentuk sebagai penggabungan antara Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan bidang Kehutanan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang dikukuhkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 280 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pertamanan, pemakaman dan kehutanan. Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sendiri dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Kedudukan Dinas Kehutanan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan pertamanan, pemakaman dan kehutanan memiliki tanggung jawab penuh atas terealisasinya penyelenggaraan keindahan kota dan pelayanan di bidang pengelolaan pertamanan, pemakaman dan kehutanan di Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 2. TPU Karet Bivak dan Taman Layangan adalah salah satu contoh RTH yang dikelola Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan memiliki Tugas Pokok untuk melaksanakan pengelolaan pertamanan, pemakaman dan kehutanan yang meliputi pembangunan, penataan, pemeliharaan, perawatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau, taman margasatwa, keindahan kota, serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pertamanan, pemakaman dan kehutanan. Tugas pokok ini merupakan penjabaran terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Kehutanan;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kehutanan;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pembangunan, penataan, pengelolaan pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi kehutanan, pertamanan dan pemakaman;
- d. perencanaan, pembangunan, penataan, pengelolaan pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi kawasan hutan, taman, jalur hijau, pemakaman dan keindahan kota;
- e. pengembangan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, pertamanan, keindahan kota dan pemakaman;
- f. pengkoordinasian penyediaan tanah hutan, hutan kota, taman dan jalur hijau dan pemakaman;
- g. penyelenggaraan pelayanan dan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar;
- h. penyusunan rancang bangun, data dan informasi ruang terbuka hijau;
- i. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang kehutanan, pertamanan dan pemakaman;
- j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pada Dinas Kehutanan;
- k. pengawasan dan pengendalian izin/non izin dibidang kehutanan, pertamanan dan pemakaman;
- l. penegakan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan, pertamanan, keindahan kota dan pemakaman;
- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Kehutanan;
- n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kehutanan;
- o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Kehutanan; dan
- p. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan

Tugas Pokok tersebut selanjutnya dilaksanakan secara operasional di lima wilayah kota oleh Suku Dinas Kehutanan Wilayah Kota Administrasi dengan mengacu pada program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 280 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan fungsinya dilengkapi dengan struktur organisasi yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan;
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas dan Satuan Pelaksana, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
3. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/ atau instansi pemerintah/swasta. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan;
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan.

b. Sekretariat;

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi Dinas dan mempunyai fungsi :

1. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran Sekretariat;
2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
3. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran Dinas Kehutanan;
4. pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran unit kerja Dinas Kehutanan;
5. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman;
6. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang urusan rumah tangga Dinas Kehutanan;
7. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Dinas Kehutanan;
8. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Dinas Kehutanan;
9. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Dinas Kehutanan;
10. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pertamanan, pemakaman dan kehutanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
11. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas Dinas;

12. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
13. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Kehutanan;
14. Pengelolaan kearsipan Dinas Kehutanan;
15. pelaksanaan kegiatan dan pengaturan acara Dinas Kehutanan;
16. penyiapan materi untuk pelaksanaan kegiatan acara Dinas Kehutanan;
17. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Kehutanan;
18. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

c. Bidang Kehutanan;

Bidang Kehutanan merupakan Unit Kerja lini Dinas Kehutanan dalam pengelolaan kehutanan, dan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan rencana strategis, dan pelaksanaan anggaran Bidang Kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. penyusunan bahan kebijakan, norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi dibidang kehutanan;
4. pelaksanaan penilaian, evaluasi, dan rekomendasi teknis perizinan/non-perizinan dibidang kehutanan;
5. pelaksanaan koordinasi pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi dibidang kehutanan;
6. pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Kawasan Esensial, daerah penyangga dan jalur hijau;
7. pelaksanaan inventarisasi, pembangunan, dan evaluasi jalur hijau;
8. pemberian rekomendasi perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi Kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar Kawasan hutan di wilayah provinsi;
9. pelaksanaan rekonstruksi dan pemeliharaan tata batas kawasan hutan;
10. pelaksanaan pemantauan rehabilitasi kawasan hutan, hutan kota dan jalur hijau;
11. pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
12. penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;

13. pelaksanaan pengembangan usaha pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon;
 14. pelaksanaan pemantauan peredaran dan usaha Tumbuhan Satwa Liar (TSL) yang tidak dilindungi/tidak masuk larmpiran (Appendix) CITES;
 15. pembinaan terhadap kegiatan pengukuran dan pengujian, pengolahan, pengawetan, pengeringan, penimbunan kayu;
 16. pelaksanaan pengendalian peredaran dan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) serta Tempat Penampung Terdaftar (TPT);
 17. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah asal hasil hutan;
 18. pelaksanaan evaluasi perancangan, pembangunan, penataan, pemeliharaan kehutanan, daerah aliran sungai dan jalur hijau;
 19. pembinaan terhadap tenaga teknis Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Rehabilitasi, PEH Pengawasan Tenaga Teknis, dan PEH Konservasi.
 20. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kawasan hutan, hutan kota dan jalur hijau;
 21. penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL);
 22. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Kehutanan;
 23. penyusunan laporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kehutanan
- d. Bidang Pertamanan;
- Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perancangan, pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman kota, taman lingkungan, taman bangunan, ornamen kota serta instalasi. Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi ;
1. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pertamanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. melaksanakan rencana strategis, dan pelaksanaan anggaran Bidang Pertamanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. penyusunan bahan kebijakan, norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), bimbingan teknis pengelolaan Taman Kota, Taman Lingkungan, Taman Bangunan, Ornamen dan Instalasi;
 4. pelaksanaan pendataan Taman Kota, Taman Lingkungan, Taman Bangunan, Ornamen dan Instalasi dalam rangka penyusunan data base;
 5. penyusunan rencana teknis pembangunan, penataan, pemeliharaan Taman Kota, Taman Lingkungan, Taman Bangunan, Ornamen dan Instalasi;
 6. pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, penataan, koordinasi pemeliharaan Taman Kota, Taman Lingkungan, Taman Bangunan, Ornamen dan Instalasi;

7. pelaksanaan pengembangan ornamen dan instalasi yang meliputi instalasi air mancur, sprinkler, lampu, patung, tugu, prasasti, signage, jam kota;
 8. pengelolaan taman kota, taman lingkungan, taman bangunan, ornamen kota serta instalasi;
 9. pelaksanaan pengembalian fungsi taman kota, taman lingkungan, taman bangunan, ornamen kota serta instalasi;
 10. pelaksanaan monitoring dan konsultasi pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman kota, taman lingkungan, taman bangunan, ornamen kota serta instalasi;
 11. pelaksanaan evaluasi perancangan dan pembangunan taman kota, taman lingkungan, taman bangunan, ornament kota serta instalasi; dan
 12. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pertamanan
- e. Bidang Pemakaman;
- Bidang Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perancangan, pembangunan, penataan taman pemakaman, pelayanan dan perpetakan makam.
- Bidang pemakaman menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pemakaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
 2. pelaksanaan rencana strategis dan pelaksanaan anggaran Bidang Pemakaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. penyusunan bahan kebijakan, norma standar prosedur dan kriteria (NSPK), bimbingan teknis pengelolaan Taman Pemakaman, pelayanan dan perpetakan makam;
 4. penyusunan rencana teknis pembangunan dan penataan Taman Pemakaman;
 5. pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan penataan Taman Pemakaman;
 6. pelaksanaan pendataan Taman Pemakaman dan perpetakan makam dalam rangka penyusunan data base;
 7. pelaksanaan koordinasi pengelolaan Taman Pemakaman, pelayanan dan perpetakan makam;
 8. pelaksanaan koordinasi perpetakan, pemindahan jenazah dan sistem makam online;
 9. pelaksanaan pengembalian fungsi Taman Pemakaman;
 10. pelaksanaan evaluasi perancangan pembangunan, penataan, pemeliharaan Taman Pemakaman;
 11. pelaksanaan pelayanan pengangkutan dan pemulasaraan jenazah;
 12. pelaksanaan monitoring dan pembinaan usaha di bidang pemakaman;
 13. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemakaman.

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan

1. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan rencana strategis dan pelaksanaan anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum;
4. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengamanan, dan penegakkan hukum bidang kehutanan, pertamanan dan pemakaman;
5. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan non izin di bidang kehutanan, pertamanan dan pemakaman;
6. pelaksanaan pemberian rekomendasi atas pelanggaran izin dan non izin di bidang kehutanan, pertamanan dan pemakaman kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
7. pelaksanaan analisa dan monitoring pemberitaan pada media massa;
8. pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa hasil hutan yang meliputi Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak termasuk dalam lampiran (Appendix) CITES dan hasil hutan;
9. pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman; pelaksanaan penyuluhan, dan kemitraan serta kerja sama dengan jejaring kehumasan kegiatan kehutanan, pertamanan dan pemakaman;
10. pelaksanaan sosialisasi peraturan dan kebijakan Dinas Kehutanan melalui publikasi;
11. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum;

g. Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi;

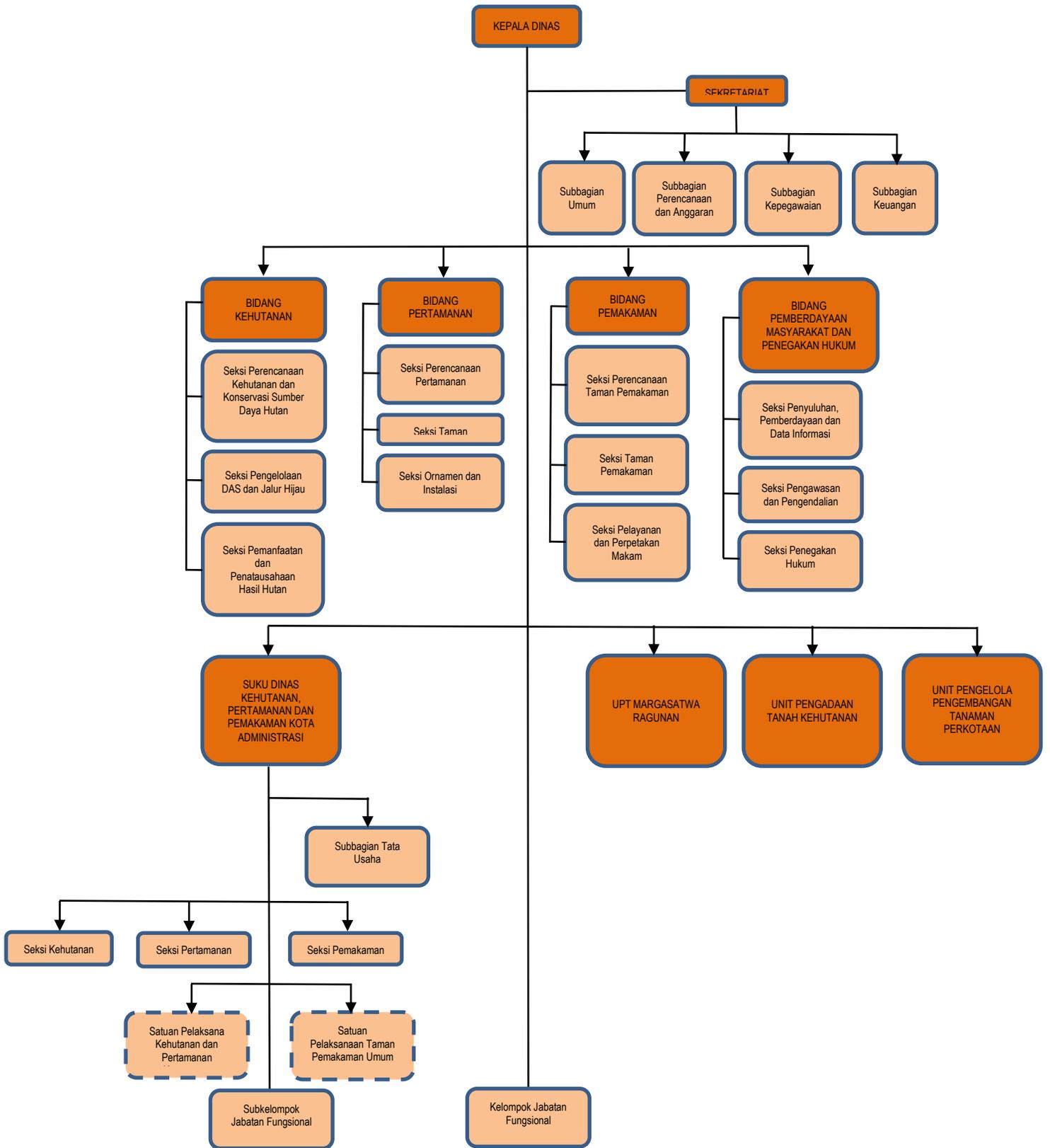
Suku Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan, pembangunan, penataan, pemeliharaan, perawatan dan pengawasan kehutanan, pertamanan, jalur hijau, sarana keindahan dan pemakaman pada lingkup wilayah Kota Administrasi.

Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi mempunyai fungsi :

1. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi;
2. pelaksanaan rencana stralegis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota Administrasi;

3. penyusunan rencana pengembangan, pemeliharaan, perawatan kehutanan, pertamanan, jalur hijau, sarana keindahan dan pemakaman pada wilayah Kota Administrasi;
4. penyusunan Perencanaan teknis kehutanan, pertamanan, jalur hijau, sarana keindahan dan pemakaman kota pada wilayah Kota Administrasi pelaksanaan pengembangan, penataan, pemeliharaan, perawatan dan pengawasan kehutanan, pertamanan, jalur hijau, sarana keindahan dan pemakaman umum pada lingkup wilayah Kota Administrasi;
5. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi kehutanan, pertamanan, jalur hijau, sarana keindahan dan pemakaman umum pada lingkup Kota Administrasi;
6. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau, sarana keindahan dan pemakaman umum berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
7. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau, sarana keindahan dan pemakaman umum;
8. pelaksanaan angkutan jenazah di dalam Provinsi DKI Jakarta;
9. pelaksanaan pelayanan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar dan keluarga tidak mampu;
10. pelaksanaan penggalian dan pemindahan kerangka jenazah;
11. pemeliharaan dan penataan prasarana dan sarana pemakaman;
12. pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap pelayanan pemakaman, prasarana dan sarana pemakaman;
13. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat yang menyelenggarakan usaha atau kegiatan di bidang pelayanan pemakaman umum;
14. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota Administrasi;
15. pengelolaan kepegawaian, keuangan•dan barang Suku Dinas Kota Administrasi;
16. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat Suku Dinas Kota Administrasi;
17. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;
18. pemanfaatan dan pengendalian prasarana dan sarana kehutanan, pertamanan, jalur hijau, sarana keindahan dan pemakaman;
19. pelaksanaan supervisi pelaksanaan kehutanan, pertamanan, jalur hijau, sarana keindahan dan pemakaman umum;

- 
20. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota Administrasi; dan
21. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- Unit pelaksana Teknis dibawah Dinas Kehutanan dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 401 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Peraturan Gubernur Nomor 402 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan dan Peraturan Gubernur Nomot 404 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengadaan Tanah Kehutanan.



Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sesuai Pergub Prov. DKI Jakarta No.280 Tahun 2016 tentang SOTK Dinas Kehutanan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sesuai data tahun 2017, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki 747 orang pegawai yang tersebar pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi, Suku Dinas Kehutanan di tingkat Kota Administrasi, dan UPT. Jumlah Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan seperti yang tercantum dalam table dibawah ini :

Tabel 1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

No	Klasifikasi	Jumlah Pegawai Dinas, Sudin, dan UPT									Jumlah
		DINAS	Sudin Kehutanan					UP Pengembang an Tanaman Perkotaan	Unit Pengadaan Tanah Kehutanan	UPT Margasatwa Ragunan	
			Jakpus	Jakut	Jakbar	Jaksel	Jaktim				
A.	Golongan	151	51	44	51	71	73	28	18	260	747
	Golongan IV	14	2	5	7	7	12	5	4	1	57
	Golongan III	101	31	28	33	45	44	19	12	68	381
	Golongan II	36	18	11	11	19	17	4	2	161	279
	Golongan I	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
B.	Pendidikan	151	51	44	51	71	73	28	18	260	747
	· S2	17	7	7	9	8	10	6	4	1	69
	· S1	71	15	16	22	26	25	12	5	31	223
	· D2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	· D3	6	5	1	1	1	4	3	1	45	67
	· SMA	41	15	15	16	27	28	4	8	130	284
	· SMP	7	5	2	2	2	3	0	0	18	39
	· SD	9	4	3	1	7	3	3	0	29	59

(Sumber : Dinas Kehutanan Desember 2017)

2.2.2 Asset/Modal

Aset yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan dapat digolongkan berupa aset bergerak dan tidak bergerak. Aset tidak bergerak yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan berupa Bangunan dan Kebun Bibit, sedangkan aset bergerak berupa kendaraan operasional Dinas Kehutanan.

a. Aset tidak bergerak

Sarana dan Prasarana kantor/ tempat bekerja yang dimiliki Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Asset tidak bergerak Dinas Kehutanan per Tahun 2017

JENIS	NAMA	LOKASI	JUMLAH/ LUAS
Kantor	▪ Dinas Kehutanan DKI Jakarta	▪ Jl. Aipda KS. Tubun No.1	1 Lokasi
	▪ Sudin Pertamanan Kodya Jak. Pusat	▪ Jl. Tanah Abang I Jakarta Pusat, telp. 344.7464	1 Lokasi
	▪ Sudin Pertamanan Kodya Jak. Utara	▪ Jl. Yos Sudarso 27-29 Jakarta Utara, telp. 430.2027	1 Lokasi
	▪ Sudin Pertamanan Kodya Jak. Barat	▪ Jl. Letjen S. Parman 2 Jakarta Barat, telp. 567.2473	1 Lokasi
	▪ Sudin Pertamanan Kodya Jak.Selatan	▪ Jl. Trunojoyo I Jakarta Selatan, telp. 720.0531	1 Lokasi
	▪ Sudin Pertamanan Kota Adm Jak. Timur	▪ Jl. Dr. Sumarno mo. 1 Jakarta Timur, telp. 4870.3470	1 Lokasi
Gedung	▪ Kantor & Fasilitas	1. Ciganjur, Jakarta Selatan	686 m2
		2. Srengseng, Jakarta Selatan	593 m2
		3. Jl.Taman Jatibaru,Jak-Pus	2.028 m2
		4. Jl. Leuser, Jakarta Selatan	227 m2
		5. Jl. Langsung, Jakarta Selatan	129 m2
		6. Jl. HR Harsono,Jak-Selatan	35 m2
		7. Jl. Tebet Barat,Jak-Selatan	114 m2
	▪ Aklimator	Ciganjur, Jakarta Selatan	225 m2
	▪ Laboratorium	Ciganjur, Jakarta Selatan	225 m2
	▪ Lath House	1. Ciganjur, Jakarta Selatan	10.267 m2
		2. Srengseng, Jakarta Barat	10.563 m2
		3. Tebet, Jakarta Selatan	8.488 m2
	▪ Green House	Ciganjur, Jakarta Selatan	336 m2
▪ Persemaian	Srengseng, Jakarta Barat	86.4 m2	
	Ciganjur, Jakarta Selatan	64.8 m2	
	Tebet, Jakarta Selatan	57.6 m2	
▪ Kursus Keterampilan (Bina Taman)	Jl. Langsung, Jakarta Selatan	6 buah & 106 m	
Kebun	▪ KB Ragunan	Jl. HR Harsono, Jakarta Selatan	80.000 m2

JENIS	NAMA	LOKASI	JUMLAH/ LUAS
Bibit	▪ KB Langsung	Jl. Langsung Jakarta Selatan	11.500 m ²
	▪ KB Leuser	Jl. Leuser, Jakarta Selatan	4.125 m ²
	▪ KB Ciganjur	Ciganjur, Jakarta Selatan	50.560 m ²
	▪ KB Tebet	Jl. Tebet Barat, Jakarta Selatan	48.000 m ²
	▪ KB Srengseng	Srengseng Jakarta Barat	80.500 m ²
Pool/ Gudang	▪ Pool kendaraan	Jl. Kahfi I, Jakarta Selatan	132 m ²
	▪ Ragunan		
	▪ Gudang	1. Jl. Leuser, Jakarta Selatan	294 m ²
		2. Jl. Langsung Jakarta Selatan	101 m ²
		3. Jl. HR Harsono, Jak-Sel	54 m ²
		4. Jl. Khafi I, Jakarta Selatan	38 m ²
	5. Jl. Tebet Barat, Jak-Sel	66 m ²	
	6. Srengseng, Jakarta Barat	54 m ²	
Pos Jaga		Jl. Lap. Banteng, Jakarta Pusat	24 m ²
		Jl. Langsung, Jakarta Selatan	9 m ²

(Sumber : Dinas Kehutanan, 2017)

b. Aset bergerak

Ketersediaan kendaraan operasional milik Dinas Kehutanan dan jajarannya merupakan elemen penting agar terlaksananya kegiatan rutin Dinas Kehutanan. Terutama untuk kegiatan pemeliharaan taman maupun jalur hijau yang kesemuanya dilakukan secara swakelola serta pelayanan pemakaman. Oleh karena itu Dinas Kehutanan dan jajarannya berusaha optimal dalam mempersiapkan pelaksanaan pemeliharaan dan pelayanan dengan melakukan pengadaan kendaraan operasional.



Gambar 4. Salah satu kendaraan Operasional Dinas Kehutanan

Tabel 3. Asset bergerak Dinas Kehutanan per Tahun 2017

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Dinas Kehutanan (termasuk suku dinas 5 wilayah dan UP TMR)
1	Mobil Jenasah	26
2	Truk Tangga	7
3	Sepeda Motor	149
4	Gerobak Motor	54
5	Mobil Mini Bus	10
6	Mobil Pick Up	116
7	Mobil Barang	1
8	Mobil Tangki Air	154
9	Kendaraan Khusus/Dump Truck	86
10	Mobil Ambulance	1
12	Grimonz Tangki Tinja	1
13	Kendaraan Penyapu Sampah	1
14	Forklift	5
15	Backhoe loader	1
16	Mobil Crane	8
17	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain (contoh :Mobil Golf, mobil pedestrian)	7
18	Mobil Karoseri Khusus Security	1
19	Mesin Potong Rumput	678
20	Mesin Potong Pohon	184
21	Alkon	200

(Sumber : Dinas Kehutanan, 2017)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan

Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dapat dilihat pada capaian target indikator kinerja dan realisasi anggaran dinas Kehutanan sejak lima tahun terakhir. Capaian target indikator kinerja dan realisasi anggaran akan dibahas pada sub bab dibawah ini.

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Salah satu indikator kinerja program Dinas Kehutanan adalah ratio penambahan RTH di Provinsi DKI Jakarta. Ada peningkatan prosentasi RTH yang dikelola oleh Dinas Kehutanan terkait dengan penambahan lahan hasil pembebasan lahan seluas 124.189 m² (12,4189 Ha) pada tahun 2017, jika hal ini ditambahkan dengan luas RTH eksisting maka capaian realisasi luas lahan RTH yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menjadi sebesar 3.175,22 Ha atau sebesar 4,86% dari luas wilayah daratan DKI Jakarta seluas 65.364,28 Ha, adapun rinciannya dapat dilihat pada Tabel dibawah :

Tabel 4. Realisasi Luas RTH yang dikelola Dinas Kehutanan per 2017

Jenis Taman Berdasarkan Kep. Men PU No.05/2008	Jenis Taman Sesuai Pengelolaan Dinas Kehutanan	Luasan Realisasi Tahun 2017 (Ha)	Realisasi Tahun 2017 terhadap Luas DKI Jakarta (%)
Taman RT dan RW	Taman Kota	974,02	1,49
Taman Kelurahan			
Taman Kecamatan			
Taman Kota			
TPU	TPU (Makam)	633,76	0,97
Jalur Hijau / Sabuk Hijau	Jalur Hijau dan Sabuk Hijau	1.173,08	1,79
Hutan Kota	Hutan Kota	187,78	0,29
	Hutan Mangrove	206,58	0,32
Total		3.175,22	4,86

Adapun rincian target dan realisasi indikator Kinerja Program Dinas Kehutanan sejak dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat didalam tabel dibawah ini :

Tabel 5. Target dan Realisasi Kinerja Program Dinas Kehutanan 2012-2017

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL 2012	TARGET KINERJA PROGRAM DINAS KEHUTANAN									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Luas Lahan Hutan Kota yang dibebaskan	41,38 Ha	40 ha	4,72 Ha	40 ha	2,4 Ha	40 ha	4,65 Ha	40 ha	0 Ha	40 ha	0 Ha
Luas Lahan Hutan Kota yang dikembangkan	minimal 640,84 Ha	Min. 5 lokasi	5 lokasi	Min. 5 lokasi	5 lokasi	Min. 5 lokasi	5 lokasi	Min. 5 lokasi	0 lokasi	Min. 5 lokasi	6 lokasi
Jumlah Pohon yang Ditanam Pada Kawasan Hutan Mangrove, Hutan Kota, Pesisir dan Permukiman	326.736 Pohon	40.000 Pohon	71.400 Pohon	40.000 Pohon	126.928 Pohon	40.000 Pohon	45.420 Pohon	40.000 Pohon	59.996 Pohon	40.000 Pohon	10,210
Jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang dikembangkan sebagai Ekowisata/ Interaksi Publik	6 Lokasi	11 lokasi	11 lokasi	16 lokasi	16 lokasi	21 lokasi	21 lokasi	26 lokasi	37 lokasi	31 lokasi	37 lokasi
Jumlah Keragaman flora dan fauna di Taman	15.389 flora fauna	15.389 flora fauna	16.159 flora fauna	15.434 flora fauna	19.229 Flora Fauna	15.467 flora fauna	52.734 flora fauna	15.510 flora fauna	52.733 flora fauna	15.560 flora fauna	83.262 flora fauna

Margasatwa Ragunan yang dapat dikonservasi												
Jumlah spesies / jenis flora dan fauna yang dikonservasi dalam kawasan hutan dan hutan kota	171 jenis flora 252 jenis fauna	171 flora 252 fauna	171 flora 252 fauna	171 flora 254 fauna	171 flora 254 fauna	171 flora 256 fauna	150 flora 113 fauna	171 flora 258 fauna	171 flora 258 fauna	171 flora 260 fauna	171 flora 162 fauna	
Luas Lahan RTH Taman dan makam yang dibebaskan	2725,74 Ha	50	9.32	50	13.75	50	50.52	50	18.03	50	12.59	
Luas RTH pertamanan dan pemakaman yang dikelola (ha)	2718.34	7.4	13.47	50	13.75	50	50.52	50	18.03	50	12.59	
Lokasi RTH yang digunakan sebagai taman kreativitas publik	10	10	0	10	6	10	10	10	0	10	6	
Jumlah sarana keindahan kota yang dikelola	266 unit	283	1648	300	2490	319	2807	338	4398	359	17,282	
Jumlah RTH yang dikembangkan oleh masyarakat	10 lokasi	20 lokasi	19 lokasi	20 lokasi	14 lokasi	20 lokasi	49 lokasi	20 lokasi	10 lokasi	20 lokasi	5	
Jumlah kegiatan penggalangan dan pemberdayaan masyarakat	175 kegiatan	55	51	55	59	55	48	55	27	55	30	
Jumlah kegiatan pengembangan RTH Kampung Terpadu oleh masyarakat	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman	185,405	73,000	39,487	73,000	73	73,000	35,972	73,000	34,139	73,000	39,753	
Mempertahankan Jakarta bebas dari pelanggaran peredaran hasil hutan	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
Jumlah Volume pelayanan jasa perkayuan	1.200 m3	1.200 m3	1.923 m3	1.200 m3	1.200 m3	1.200 m3	1.450 m3	1.200 m3	1.200 m3	1.200 m3	64,585	

Dari tabel diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Kehutanan belum mencapai level yang maksimal dikarenakan :

1. Belum tercapainya target Penambahan kuantitas Ruang Terbuka Hijau
2. Masih kurang optimalnya kualitas Ruang Terbuka Hijau
3. Masih rendahnya tingkat pelayanan khususnya di bidang pemakaman
4. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

2.3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi atau Serapan anggaran yang dicapai oleh Dinas Kehutanan mengindikasikan berjalannya program yang sudah disusun oleh Dinas Kehutanan. Realisasi anggaran Dinas Kehutanan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan 2013-2017

Kategori Belanja	Anggaran					Realisasi					Persentase				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Langsung	1,119,305,475,468	2,378,254,597,043	2,437,791,770,455	1,390,588,981,602	776,215,881,082	415,012,537,340	611,117,816,403	1,209,007,726,663	667,717,097,360	671,902,878,920	37,08%	25,70%	49,59%	48,02%	86,56%
- Pegawai	960,965,000	5,658,884,068	30,324,241,525	767,312,000	141,645,539,761	714,531,700	1,880,699,920	28,387,339,580	44,353,560	99,804,875,140	74,36%	33,23%	93,61%	5,78%	70,46%
- Barang Jasa	145,098,477,868	165,700,136,281	61,297,431,066	115,140,569,675	634,570,341,321	117,051,527,110	117,924,113,660	44,702,786,130	74,480,313,502	572,098,003,780	80,67%	71,17%	72,93%	64,69%	90,16%
- Modal	973,246,032,600	2,206,895,576,694	2,346,170,097,864	1,274,681,099,927	217,606,318,300	297,246,478,530	491,313,002,823	1,135,917,600,953	593,192,430,298	199,605,685,976	30,54%	22,26%	48,42%	46,54%	91,73%
Belanja Tidak Langsung	65,024,709,923	70,614,864,000	113,482,302,000	131,706,375,102	217,606,318,300	57,888,897,993	57,272,164,877	110,224,437,181	117,978,183,298	199,605,685,976	89,03%	81,10%	97,13%	89,58%	91,73%
- Pegawai	65,024,709,923	70,614,864,000	113,482,302,000	131,706,375,102	993,822,199,382	57,888,897,993	57,272,164,877	110,224,437,181	117,978,183,298	871,508,564,896	89,03%	81,10%	97,13%	89,58%	87,69%
Total BL dan BTL	1,184,330,185,391	2,448,869,461,043	2,551,274,072,455	1,522,295,356,704	993,822,199,382	472,901,435,333	668,389,981,280	1,319,232,163,844	785,695,280,658	871,508,564,896	39,93%	27,29%	51,71%	51,61%	87,69%

Penyerapan anggaran Dinas Kehutanan masih cenderung didominasi oleh kegiatan pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau. Prosentase penyerapan anggaran masih menunjukkan grafik yang fluktuatif atau naik turun. Pada tahun 2013-2016 prosentase penyerapan anggaran Dinas Kehutanan menunjukkan angka dibawah 50%, hal ini sebagai dampak dari penyerapan anggaran

pembebasan lahan kurang bisa optimal terserap karena proses pendataan lahan sebagai dasar penyusunan anggaran pembebasan lahan yang kurang baik. Lahan-lahan yang sudah terdata dan masuk dalam anggaran untuk dibebaskan namun dalam kenyataannya banyak yang masih belum clear dan masih terkendala dengan legalitas asetnya. Khusus di tahun 2016 selain dikarenakan masalah pembebasan lahan, kurang baiknya perencanaan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik serta penyedia yang tidak lulus kualifikasi menyebabkan pekerjaan fisik banyak yang gagal lelang, sehingga berdampak pada penyerapan Dinas Kehutanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan

Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan dapat dilakukan dengan melihat pencapaian target kinerja dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Kehutanan dari tahun 2012 sampai dengan 2017, metode yang bisa digunakan untuk melihat tantangan dan peluang adalah menggunakan metode SWOT dengan melakukan analisa baik lingkungan internal maupun eksternal.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, social budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Gambar 5. Kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenasah dan pelatihan Pertamanan yang diadakan oleh Dinas Kehutanan

Tabel 7. Analisa Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan (Strength)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Undang-Undang tentang Penataan Ruang 2. Adanya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 3. Status Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara 4. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial 	<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Peraturan Daerah yang spesifik mengatur tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2. Masih tumpang tindihnya kewenangan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 3. Belum terdapat Rencana Induk (<i>Master Plan</i>) RTH Provinsi DKI Jakarta 4. Belum adanya SOP yang memadai tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 5. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih rendah 6. Rendahnya Pelayanan di Bidang Pemakaman
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang (Opportunities)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan finansial pihak swasta untuk ikut serta dalam pembangunan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau 2. Adanya tuntutan masyarakat dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas 3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau Provinsi DKI Jakarta 4. Semakin buruknya kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta 	<p>Ancaman (Threat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya harga tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta 2. Tingginya tingkat alih fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi Ruang Terbangun 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga Ruang Terbuka Hijau 4. Kurangnya perencanaan pembangunan yang komprehensif yang berorientasi pada kelestarian lingkungan 5. Menurunnya keanekaragaman hayati di wilayah DKI Jakarta 6. Banyaknya praktek Pungli Pemakaman yang dilakukan oleh oknum

Dari Analisa S-W-O-T yang dilakukan maka tantangan dan peluang dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan dapat dilihat dari *threat* dan *opportunities* yang telah diuraikan meliputi:

a. Tantangan:

1. Tingginya harga tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta
2. Tingginya tingkat alih fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi Ruang Terbangun
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga Ruang Terbuka Hijau
4. Kurangnya perencanaan pembangunan yang komprehensif yang berorientasi pada kelestarian lingkungan
5. Menurunnya keanekaragaman hayati di wilayah DKI Jakarta
6. Banyaknya praktek Pungli Pemakaman yang dilakukan oleh oknum

b. Peluang:

1. Kemampuan finansial pihak swasta untuk ikut serta dalam pembangunan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau
2. Adanya tuntutan masyarakat dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas
3. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau Provinsi DKI Jakarta
4. Semakin buruknya kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta

BAB 3

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kehutanan



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dari uraian tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebetulnya dapat ditemukan berbagai permasalahan yang harus dipecahkan oleh Dinas Kehutanan, beberapa permasalahan tersebut antara lain:

Tabel 8. Identifikasi permasalahan Dinas Kehutanan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Pencapaian Ratio RTH yang belum optimal	Tidak adanya pedoman baku dalam pengadaan lahan	Belum adanya Masterplan RTH Provinsi DKI Jakarta
2	Rendahnya kepuasan masyarakat khususnya dalam pelayanan pemakaman	Masih banyaknya praktek pungutan liar	Rendahnya integritas dan produktifitas aparatur
3	Sedikitnya keanekaragaman hayati di Provinsi DKI Jakarta	Sedikitnya jenis flora dan fauna yang dikonservasi	Sarana dan prasarana kegiatan konservasi yang belum memadai
4	Tata kelola organisasi yang belum optimal	Rendahnya kinerja aparatur	Penyediaan sarana prasarana pendukung operasional aparatur yang belum memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi, misi dan janji kerja yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode tahun 2017 – 2022. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Gubernur bersama Wakil Gubernur. Sasaran adalah penjabaran

dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

a. VISI

Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satukabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

Maju : memiliki arti menjadilebih baikatauberkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut *World Cities Culture Report 2015* sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya

adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

b. MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Misi Pertama : *Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.***

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya. Jakarta sebagai kota yang aman bagi setiap penghuninya. Perhatian terutama diberikan kepada peningkatan rasa aman bagi perempuan dan anak. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat tersebut dibarengi dengan upaya perbaikan layanan Pemerintah, serta penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan pengawasan keamanan di tempat-tempat publik serta respons atas pengaduan korban kekerasan secara baik dan cepat.

2. **Misi Kedua : *Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.***

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan, meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta, dan mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

3. **Misi Ketiga : *Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.***

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Jakarta sebagai ruang pembelajaran bagi aparatur negara untuk menumbuhkan kemampuan kemampuannya. Birokrasi di Jakarta harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur negara juga tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, namun juga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif, inklusif dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.

4. **Misi Keempat : *Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.***

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas lingkungan di Jakarta. Pembangunan yang lestari tidak hanya memerhatikan daya dukung lingkungan namun juga menaruh perhatian besar pada daya dukung sosial. Daya dukung sosial ini memerlukan komitmen Pemerintah dan seluruh pihak untuk memastikan adanya keseimbangan antara proses pembangunan yang secara lingkungan lestari dengan pembangunan yang menghormati ruang hidup sosial masyarakat yang telah dulu ada.

5. **Misi Kelima : *Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.***

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia, menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan

menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras, dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia.

Dari kelima misi Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022, misi ke-3 : ***Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas*** dan misi ke-4 : ***Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial*** menjadi misi yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan.

c. JANJI KERJA

Janji Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimandatkan oleh warga Jakarta merupakan unsur pokok dalam menyusun program dan kegiatan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Ada 23 Janji Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi DKI Jakarta, namun demikian hanya ada 4 janji yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan, janji itu adalah :

1. Membangun pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (*Smart City*).
2. Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95 persen, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki manajemen aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta melalui kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan budaya membaca melalui Program Taman Maju Bersama, yaitu merevitalisasi taman-taman yang ada, membangun taman-taman baru dari wilayah pinggiran Jakarta, serta membangun Taman Pintar (*Science Park*).
4. Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga, menggalakkan kegiatan cocok tanam kota (*urban farming*); melakukan audit berkala keamanan kampung, serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tahun 2015- 2019 yang telah ditetapkan, sasaran strategis yang bisa dijadikan tolak ukur renstra Dinas Kehutanan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Kajian Telaahan Renstra Kementerian LHK disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen LHK	Permasalahan Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat	1. Kuantitas dan kualitas RTH Kehutanan yang masih minim	Terbatasnya lahan dan tingginya harga lahan	Adanya dukungan pembiayaan dari APBD
2.	Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Potensi terbesar hanya sebatas pada retribusi pengawasan peredaran hasil hutan	Hutan yang ada di Provinsi DKI Jakarta hanya sebatas sebagai Hutan Kota dan Hutan Mangrove	Komitmen dari pemerintah untuk pengembangan hutan
3.	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Belum tersedianya SOP yang memadai	Keterbatasan sumber daya manusia	Komitmen dari pemerintah untuk pengembangan SDM Kehutanan

Sedangkan, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kemeterian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2015- 2019, sasaran strategis yang merupakan ukuran kinerja pencapaian misi, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan adalah:

Tabel 10. Kajian Telaahan Renstra Kementerian ATR disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen-ATR	Permasalahan Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (output: Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang)	Terhambat dan lambannya penyediaan lahan RTH Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman	1. Belum terdapat Rencana Induk (Masterplan) RTH Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman; 2. Terbatasnya lahan dan tingginya harga lahan.	Adanya dukungan pembiayaan dari APBD

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030, untuk mendukung tujuan terwujudnya keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di bawah permukaan tanah dan di bawah permukaan air dengan mempertimbangkan kondisi kota Jakarta sebagai kota delta (delta city) dan daya dukung sumber daya alam serta daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan maka langkah yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Pelaksanaan konservasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan lindung, sumber daya air, dan pengembangan RTH untuk keseimbangan ekologi kota Jakarta;
- b. Pengembangan RTH untuk mencapai 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat yang didedikasikan sebagai RTH bersifat publik seluas 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat seluas 10% (sepuluh persen) sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota.

Mengacu pada 2 (dua) langkah diatas, maka dapat dijadikan dasar penentuan aspek kajian sebagai bahan telaahan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 11. Kajian Telaahan RTRW Provinsi DKI Jakarta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Pengembangan RTH untuk mencapai 30% dari luas daratan Provinsi DKI Jakarta (20% RTH Publik dan 10 % RTH Privat) sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota;	4.86 % dari luas Wilayah Kota	20% RTH dari Luas Wilayah Kota	1. Belum terdapat Rencana Induk (Master Plan) RTH Provinsi DKI Jakarta; 2. Belum tersedianya SOP yang memadai	1. Tingginya nilai tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 2. Tingginya tingkat alih fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi Ruang Terbangun 3. Kurangnya perencanaan pembangunan yang komprehensif yang berorientasi pada kelestarian lingkungan	Terhambat dan lambannya penyediaan lahan RTH Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman

Aspek Kajian pada telaahan RTRW tersebut diatas sebetulnya juga menjadi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan tema penataan ruang pada KLHS RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Isu-isu strategis itu meliputi:

- a. Pengendalian Pemanfaatan ruang kota
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang publik dan ruang terbuka hijau

Dari dua poin isu strategis tema penataan ruang tersebut, aspek peningkatan kuantitas dan kualitas ruang public dan ruang terbuka hijau menjadi isu yang aspek yang paling dominan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dinas kehutanan.

Tabel 12. Isu Strategis KLHS RPJMD 2017-2022 yang berkaitan dengan penataan ruang

Aspek Kajian	Standar Yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang public dan ruang terbuka hijau	30% RTH dari Luas Wilayah Kota, dengan rincian 20% public dan 10% privat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak maksimalnya pemberlakuan kesesuaian zonasi sesuai penetapan di RTRW dan RDTR 2. Belum adanya masterplan RTH Provinsi DKI Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya nilai tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 2. Identifikasi potensi RTH lintas sektoral yang kurang maksimal 3. Kurang maksimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 	Terhambat dan lambannya pemenuhan kualitas dan kuantitas RTH kehutanan, pertamanan dan pemakaman

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, Renstra Kementerian, RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030, dan juga Telaahan KLHS RPJMD DKI Jakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa yang mejadi isu strategis Dinas Kehutanan sebagai acuan dalam penentuan rencana strategisnya selama kurun waktu lima tahun periode 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau
2. Peningkatan Konservasi Flora Fauna untuk meningkatkan daya dukung lingkungan
3. Peningkatan produktifitas dan integritas kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik
4. Perbaikan tata pola organisasi yang akuntable dan transparan
5. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

BAB 4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta merumuskan visi sebagai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan sebagai berikut :

“Ruang Terbuka Hijau Jakarta yang Nyaman, Maju, Lestari dan Terjangkau bagi warga”

Ruang Terbuka Hijau : area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen PU No.5/PRT/M/2008)

Nyaman : suatu kondisi yang menimbulkan rasa segar, sejuk dan enak, sehingga diharapkan setiap RTH yang dikelola oleh Dinas Kehutanan mampu membuat rasa segar, sejuk dan enak bagi masyarakat.

Maju : memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Terjangkau bagi warga: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “terjangkau” adalah tercapai, sehingga diharapkan RTH di Jakarta adalah RTH yang terhubung dan dekat dengan tempat tinggal dan pusat-pusat aktivitas sehingga mudah dicapai oleh seluruh warga kota serta memudahkan keterlibatan dan peran serta masyarakat terhadap pengembangan Ruang Terbuka tersebut.

Adapun Visi Dinas Kehutanan tersebut diwujudkan melalui misi-misi sebagai berikut :

1. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Hutan, Taman dan Pemakaman yang nyaman sebagai ruang aktivitas dan kreativitas publik;
2. Meningkatkan Pelayanan dan peran serta masyarakat di Bidang Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
3. Mewujudkan konservasi flora dan fauna yang memperkuat daya dukung lingkungan.

4. Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Visi Misi Dinas Kehutanan yang berorientasi pada terwujudnya Ruang Terbuka Hijau yang nyaman, Maju, Lestari dan terjangkau bagi warga yang dimanifestasikan kedalam kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas RTH, Peningkatan pelayanan pemakaman dan konservasi flora fauna sangat sejalan dengan visi kepala daerah periode 2017-2022 yang berusaha mewujudkan kota Jakarta yang maju melalui suatu usaha Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Dari perumusan Visi Misi Dinas Kehutanan ini, dapat dijabarkan tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan, yaitu:

a. Tujuan

Berdasarkan perumusan misi diatas, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta lebih lanjut menjabarkan dalam tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial
2. Mewujudkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel
3. Meningkatnya iklim kerja aparatur Dinas Kehutanan

b. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas, maka sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut :

- **Sasaran 1 :**
Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- **Sasaran 2 :**
Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari
- **Sasaran 3 :**
Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel
- **Sasaran 4 :** Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur Dinas Kehutanan



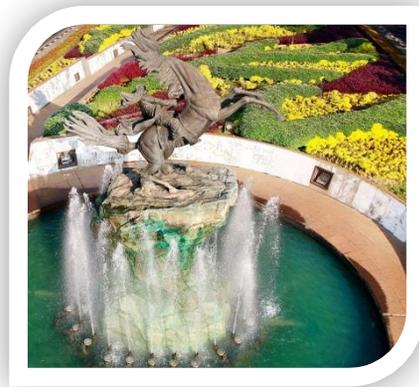
Gambar 6. Pengadaan Peralatan Kerja sebagai pendukung kinerja aparatur Dinas Kehutanan

Tabel 13. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Mewujudkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	83%	85%	87%
2	Meningkatnya iklim kerja aparatur Dinas Kehutanan	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur Dinas Kehutanan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	4	4	4	4
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	3	3	3	3	3
3	Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Penambahan jumlah fauna dan flora yang dikonservasi	2.142 fauna dan flora	2.152 fauna dan flora	2.162 fauna dan flora	2.172 fauna dan flora	2.182 fauna dan flora
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penambahan Rasio RTH	0,0665 %	0,0351 %	0,0351 %	0,0351 %	0,0351 %

BAB 5

Strategi dan Arah Kebijakan



Tabel 14. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah

<i>Visi : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua</i>			
Misi Ketiga : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel	Optimalisasi Pelayanan Pemakaman	Optimalisasi Pelayanan Pemakaman
Meningkatnya iklim kerja aparatur Dinas Kehutanan	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur Dinas Kehutanan	Peningkatan dan pengelolaan Kantor dan kendaraan operasional dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang sesuai standar melalui peningkatan dan pengelolaan kantor serta pengelolaan kendaraan operasional

Misi Keempat : <i>Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial</i>			
Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Mendorong Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau	Optimalisasi RTH Hutan, Taman dan Makam melalui pengadaan tanah, pembangunan dan pemeliharaan
	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Peningkatan jumlah flora dan fauna yang dikonservasi dengan didukung penyediaan sarana dan prasarana yang memadai	Peningkatan jumlah flora dan fauna yang dikonservasi dan terjamin kualitas habitatnya



BAB 6

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana program dan kegiatan Dinas Kehutanan beserta pendanaan indikatif sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Rencana Program dan Kegiatan ini nantinya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja dinas kehutanan selama lima tahun kedepan. Adapun rencana program dan kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 15. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
					Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat															
		Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pemakaman	80%	80%	0	82%	6,902,659,203	83%	7,553,584,884	85%	8,269,603,132	87%	9,057,223,204	87%	31,783,070,423	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Pemakaman	Jenis sarana prasarana pelayanan pemakaman yang tersedia	0	0	0	6 jenis	3,222,544,090	6 jenis	3,505,458,260	6 jenis	3,816,663,845	6 jenis	4,158,989,989	6 jenis	14,703,656,184	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengangkutan dan Pemulasaraan Jenazah Terlantar	Jumlah petugas pengangkutan dan pemulasaraan jenazah terlantar	48 orang	0	0	48 orang	3,577,033,402	48 orang	3,934,736,742	48 orang	4,328,210,417	48 orang	4,761,031,458	48 orang	16,601,012,019	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pelatihan Keterampilan Masyarakat di Bidang Pemakaman	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang pemakaman	400 orang	0	0	400 orang	103,081,711	400 orang	113,389,882	400 orang	124,728,870	400 orang	137,201,757	1600 orang	478,402,220	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

Mewujudkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat															
		Program Pengelolaan Pemakaman	Indeks kepuasan masyarakat	80%	80%	123,849,420,109	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	123,849,420,109	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penataan RTH Makam	Jumlah RTH makam yang ditata	22 lokasi	7 lokasi	39,734,271,006	0	0	0	0	0	0	0	0	7 lokasi	39,734,271,006	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Pemakaman	Jenis sarana prasarana pelayanan pemakaman yang tersedia	6 jenis	6 jenis	2,864,209,931	0	0	0	0	0	0	0	0	6 jenis	2,864,209,931	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengangkutan dan Pemulasaraan Jenazah terlantar	Jumlah petugas pengangkutan dan pemulasaraan jenazah terlantar	48 orang	48 orang	2,993,914,004	0	0	0	0	0	0	0	0	48 orang	2,993,914,004	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pelatihan Keterampilan Masyarakat di Bidang Pemakaman	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang pemakaman	400 orang	150 orang	47,637,288	0	0	0	0	0	0	0	0	150 orang	47,637,288	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengamanan RTH Makam	Jumlah petugas pengamanan RTH makam	282 orang	315 orang	15,792,280,245	0	0	0	0	0	0	0	0	315 orang	15,792,280,245	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pemeliharaan RTH Makam	Jumlah RTH makam yang dipelihara	82 lokasi	82 lokasi	62,417,107,635	0	0	0	0	0	0	0	0	82 lokasi	62,417,107,635	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari		Penambahan jumlah fauna dan flora yang dikonservasi														
		Program Konservasi Flora dan Fauna	Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	2132 fauna	0	0	2152 fauna	106,412,584,059	2162 fauna	199,177,047,195	2172 fauna	144,246,983,091	2182 fauna	128,886,904,279	2182 fauna	578,723,518,625	Dinas Kehutanan

	Pengadaan Makanan Satwa TMR	Pengadaan Makanan Satwa TMR per tahun	12 bulan	0	0	12 bulan	22,745,000,000	12 bulan	25,020,000,000	12 bulan	27,520,000,000	12 bulan	30,275,000,000	48 bulan	105,560,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pengadaan Obat Satwa	Pengadaan Obat Satwa per tahun	12 bulan	0	0	12 bulan	834,022,624	12 bulan	917,424,886	12 bulan	1,009,167,374	12 bulan	1,110,084,112	48 bulan	3,870,698,996	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Penyusunan Master Plan TMR	Jumlah dokumen master plan TMR yang tersusun	0	0	0	0	0	5 dokumen	7,500,000,000	0	0	0	0	5 dokumen	7,500,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Belanja Operasional Badan Layanan Umum TMR	Belanja Operasional Badan Layanan Umum TMR per tahun	1 tahun	0	0	1 tahun	37,500,000,000	1 tahun	38,000,000,000	1 tahun	38,500,000,000	1 tahun	39,000,000,000	4 tahun	153,000,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan TMR	Jenis Pakaian Kerja dan Kelengkapan TMR yang tersedia	17 jenis	0	0	17 jenis	1,413,272,438	17 jenis	1,554,599,681	17 jenis	1,710,059,649	17 jenis	1,881,065,614	17 jenis	6,558,997,382	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Penataan Sarana dan Prasarana TMR	Luas sarana dan prasarana TMR yang tertata	0	0	0	218.708 m2	28,744,289,197	94.661 m2	111,031,081,047	69.895 m2	60,333,332,064	18.910 m2	29,570,552,000	402.174 m2	229,679,254,308	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pembangunan Sarana dan Prasarana TMR	Luas sarana dan prasarana TMR yang terbangun	154 m'	0	0	2.925 m2	4,150,405,000	4.637,75 m2	4,671,956,000	3.900 m2	3,510,000,000	5.874 m2	14,367,000,000	17.336,75 m2	26,699,361,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pengamanan dan Pelayanan Pengunjung TMR	Jumlah petugas Pengamanan dan Pelayanan Pengunjung TMR	311 orang	0	0	187 orang	9,529,077,801	187 orang	10,481,985,581	187 orang	11,530,184,139	187 orang	12,683,202,553	187 orang	44,224,450,075	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Perencanaan Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana TMR	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan penataan sarana prasarana TMR yang tersusun	0	0	0	42 dokumen	1,496,517,000	0	0	3 dokumen	134,239,864	0	0	45 dokumen	1,630,756,864	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	52.733 flora	0	0	52.773 flora	15,083,460,049	52.793 flora	16,591,806,054	52.813 flora	18,250,986,659	52.833 flora	20,076,085,325	52.833 flora	70,002,338,086	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pemeliharaan untuk Perbaikan Sarana Prasarana, Penyiraman dan Pengangkutan	Jumlah PHL Pemeliharaan untuk Perbaikan Sarana Prasarana, Penyiraman dan Pengangkutan	266 orang	0	0	296 orang	15,083,460,049	296 orang	16,591,806,054	296 orang	18,250,986,659	296 orang	20,076,085,325	296 orang	70,002,338,086	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari		Penambahan jumlah fauna dan flora yang dikonservasi															
		Program Konservasi Satwa	Penambahan jumlah satwa yang dikonservasi	2.132 satwa	2.142 satwa	116,028,745,134	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142 satwa	116,028,745,134	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengadaan Makanan Satwa TMR	Pengadaan Makanan Satwa TMR per tahun	12 bulan	12 bulan	19,726,128,258	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	19,726,128,258	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengadaan Obat Satwa	Pengadaan Obat Satwa per tahun	12 bulan	12 bulan	758,202,152	0	0	0	0	0	0	0	0	12 bulan	758,202,152	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penataan Sarana dan Prasarana TMR	Luas sarana dan prasarana TMR yang tertata	0	37212,467 m2	49,687,265,432	0	0	0	0	0	0	0	0	37212,467 m2	49,687,265,432	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pembangunan Sarana dan Prasarana TMR	Luas sarana dan prasarana TMR yang terbangun	154 m ²	2.277,75 m2	3,857,149,292	0	0	0	0	0	0	0	0	2.277,75 m2	3,857,149,292	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Belanja Operasional Badan Layanan Umum TMR	Belanja Operasional Badan Layanan Umum TMR per tahun	1 tahun	1 tahun	42,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 tahun	42,000,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Penambahan Rasio RTH															
		Program Pengelolaan Hutan	Penambahan Rasio RTH Hutan	0.024%	0.0085%	263,313,478,033	0.0115%	520,500,000,000	0.0115%	622,600,000,000	0.0115%	745,120,000,000	0.0115%	892,144,000,000	0.079%	3,043,677,478,033	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengadaan Tanah untuk RTH Hutan	Luas lahan untuk RTH hutan yang dibebaskan	15,8 Ha	5,56 Ha	250,000,000,000.00	7,5 Ha	504,000,000,000.00	7,5 Ha	604,800,000,000	7,5 Ha	725,760,000,000	7,5 Ha	870,912,000,000.00	51,36 Ha	2,955,472,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

	Pembangunan RTH Hutan	Luas RTH hutan yang dibangun	0	3 Ha	10,266,984,066	3 Ha	9,000,000,000	15 Ha	46,266,984,066	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta						
	Pembangunan Lampu Hutan	Jumlah titik lampu yang terbangun di RTH hutan	0	0	0	40 titik	6,500,000,000	40 titik	7,800,000,000	40 titik	9,360,000,000	40 titik	11,232,000,000	160 titik	34,892,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pembangunan Pagar RTH Hutan	Panjang pagar RTH hutan yang terbangun	2.295 m'	1.000 m'	3,046,493,967	1.000 m'	1,000,000,000	7.295 m'	7,046,493,967	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta						
		Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara	93%	95%	90,718,694,915	95%	30,823,939,972	96%	32,602,251,181	97%	35,533,068,802	97%	37,672,278,513	97%	227,350,233,383	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pemeliharaan RTH Hutan	Jumlah lokasi RTH hutan yang dipelihara	41 lokasi	57 lokasi	58,205,832,903	62 lokasi	18,546,842,371	67 lokasi	19,311,237,269	72 lokasi	20,152,071,657	77 lokasi	21,076,989,484	77 lokasi	137,292,973,685	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Penataan RTH Hutan	Jumlah lokasi RTH hutan yang ditata	3 lokasi	5 lokasi	25,436,246,699	5 lokasi	3,326,381,405	5 lokasi	3,557,011,991	6 lokasi	4,810,565,106	5 lokasi	5,089,323,167	29 lokasi	42,219,528,368	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pengamanan Hutan Kota, TPK dan Pos Peredaran, Patroli Pengawasan dan Pengendalian Terpadu RTH Hutan	Jumlah personel pengamanan RTH hutan	0	131 orang	6,567,583,213	152 orang	8,020,401,896	167 orang	8,772,415,241	183 orang	9,574,562,809	201 orang	10,476,978,823	201 orang	43,411,941,982	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	Jumlah personel polisi kehutanan yang ikut peningkatan kapasitas	0	25 orang	55,539,000	25 orang	61,092,900	25 orang	67,202,190	25 orang	73,922,409	25 orang	81,314,650	125 orang	339,071,149	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pembinaan Saka Wana Bhakti	Jumlah masyarakat yang terbina melalui kegiatan Saka Wana Bhakti	400 orang	500 orang	318,031,500	500 orang	334,767,000	500 orang	356,181,290	500 orang	379,619,940	500 orang	400,809,460	2500 orang	1,789,409,191	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Operasi Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar	Jumlah penyelenggaraan kegiatan operasi pengendalian tumbuhan dan satwa liar	4 kali	4 kali	110,161,600	20 kali	550,808,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta								
	Pengawasan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan peredaran hasil hutan	0	10 kali	25,300,000	10 kali	37,488,000	10 kali	41,236,800	10 kali	45,360,480	10 kali	49,896,528	50 kali	199,281,808	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

		Penyusunan Kebijakan di Bidang Kehutanan	Jumlah dokumen kebijakan di Bidang Kehutanan yang tersusun	0	0	0	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	800,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta						
		Penanganan dan Penyelesaian Kasus di Dinas Kehutanan	Jumlah kasus yang tertangani dan terselesaikan	17 kasus	0	0	20 kasus	186,804,800	20 kasus	747,219,200	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta						

Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Penambahan Rasio RTH															
		Program Pengelolaan Pertamanan	Penambahan Rasio RTH Taman	0.139%	0.044%	1,345,715,859,738	0.019%	952,555,000,000	0.019%	1,129,427,750,000	0.019%	1,340,819,137,500	0.019%	1,593,430,094,375	0.259%	6,361,947,841,613	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Taman	Luas lahan yang dibebaskan untuk RTH taman	90,61 Ha	28,89 Ha	1,300,000,000,000	12,5 Ha	840,000,000,000	12,5 Ha	1,008,000,000,000	12,5 Ha	1,209,600,000,000	12,5 Ha	1,451,520,000,000	169,5 Ha	5,809,120,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman	Luas RTH taman yang terbangun	2.134,17 Ha	8,57 Ha	27,361,050,241	22 Ha	80,000,000,000	22 Ha	88,000,000,000	22 Ha	96,800,000,000	22 Ha	106,480,000,000	2.230,74 Ha	398,641,050,241	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pembangunan RTH Taman Jalur Hijau	Luas RTH taman jalur hijau yang terbangun	6,68 Ha	0	0	3	6,000,000,000	3	6,000,000,000	3	6,000,000,000	3	6,000,000,000	18,68 Ha	24,000,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kebun Bibit	Luas RTH kebun bibit yang terbangun	0	0	0	1	5,000,000,000	1	5,500,000,000	1	6,100,000,000	1	6,700,000,000	4	23,300,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pembangunan Lampu RTH Taman	Jumlah titik lampu yang terbangun di RTH taman	902 titik	641 titik	11,286,822,080	640 titik	11,500,000,000	640 titik	11,500,000,000	640 titik	11,500,000,000	640 titik	11,500,000,000	3.201 titik	57,286,822,080	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pembangunan Pagar RTH Taman	Panjang pagar RTH taman yang terbangun	0	1.200 m'	3,603,193,977	1.200 m'	3,675,000,000	1.200 m'	3,858,750,000	1.200 m'	4,051,687,500	1.200 m'	4,254,271,875	6.000 m'	19,442,903,352	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pembangunan Pagar RTH Taman Jalur Hijau	Panjang pagar RTH taman jalur hijau yang terbangun	0	0	0	2.000 m'	2,600,000,000	2.000 m'	2,600,000,000	2.000 m'	2,600,000,000	2.000 m'	2,600,000,000	8.000 m'	10,400,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

Pembangunan Ornamen dan Sarana Keindahan Kota di RTH Taman	Jumlah unit ornamen dan sarana keindahan kota di RTH Taman yang terbangun	0	0	0	2 unit	3,780,000,000	2 unit	3,969,000,000	2 unit	4,167,450,000	2 unit	4,375,822,500	8 unit	16,292,272,500	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
Pembangunan Air Mancur di Wilayah DKI Jakarta	Jumlah lokasi air mancur yang terbangun di wilayah DKI Jakarta	0	2 unit	3,086,197,075	0	0	0	0	0	0	0	0	2 unit	3,086,197,075	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
Pembangunan Sarana Penyiraman di Wilayah DKI Jakarta	Jumlah lokasi sarana penyiraman yang terbangun di wilayah DKI Jakarta	0	7 unit	378,596,365	0	0	0	0	0	0	0	0	7 unit	378,596,365	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara	99%	99%	138,058,446,537	99%	229,028,367,853	99%	251,518,978,374	99%	275,125,683,394	99%	300,706,901,837	99%	1,194,438,377,995	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman	Persentase RTH taman yang terpelihara	99%	99%	42,864,760,665	99%	46,189,943,264	99%	51,332,437,591	99%	56,825,681,350	99%	62,098,249,486	594%	259,311,072,356	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau	Persentase RTH taman jalur hijau yang terpelihara	99%	0	0	99%	53,257,586,249	99%	56,772,422,643	99%	60,818,572,236	99%	66,135,666,346	594%	236,984,247,474	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kebun Bibit	Jumlah RTH kebun bibit yang terpelihara	6 lokasi	6 lokasi	9,425,233,924	7 lokasi	10,148,843,502	8 lokasi	11,638,380,428	9 lokasi	13,366,013,677	10 lokasi	15,372,088,753	10 lokasi	59,950,560,284	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
Penataan RTH Taman	Jumlah RTH taman yang ditata	25 lokasi	26 lokasi	23,857,628,231	45 lokasi	40,000,000,000	45 lokasi	44,000,000,000	45 lokasi	48,400,000,000	45 lokasi	53,240,000,000	206 lokasi	209,497,628,231	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
Penataan RTH Taman Jalur Hijau	Jumlah RTH taman jalur hijau yang tertata	18 lokasi	0	0	12 lokasi	13,883,361,257	15 lokasi	17,169,656,921	16 lokasi	19,252,731,477	17 lokasi	19,863,904,417	60 lokasi	70,169,654,072	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
Penataan RTH Kebun Bibit	Luas RTH kebun bibit yang tertata	11,24 Ha	17,91 Ha	6,894,724,219	17,91 Ha	8,000,000,000	17,91 Ha	10,000,000,000	17,91 Ha	10,000,000,000	17,91 Ha	10,000,000,000	89,55 Ha	44,894,724,219	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit	Jenis sarana dan prasarana kebun bibit yang diadakan	29 jenis	26 jenis	3,727,391,475	0	0	0	0	0	0	0	0	26	3,727,391,475	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
Pemeliharaan Ornamen dan Sarana Keindahan Kota	Pemeliharaan Ornamen dan Sarana Keindahan Kota per tahun	1 tahun	1 tahun	11,401,561,055	1 tahun	5,425,000,000	1 tahun	6,200,000,000	1 tahun	6,725,000,000	1 tahun	7,500,000,000	5 tahun	37,251,561,055	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
Pemeliharaan Lampu	Jumlah titik lampu yang terpelihara	5.407 titik	6.275 titik	0	6.996 titik	7,050,000,000	7.716 titik	9,400,000,000	8.436 titik	11,200,000,000	9.156 titik	13,700,000,000	43.986 titik	41,350,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

	Pengadaan Tanaman dan Bahan Dekorasi	Jenis Tanaman dan Bahan Dekorasi yang diadakan	72 jenis	85 jenis	14,038,569,930	81 jenis	11,145,916,435	81 jenis	11,703,212,257	87 jenis	12,288,372,870	87 jenis	12,902,791,514	421 jenis	62,078,863,006	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pemeliharaan Tanaman Dekorasi	Jumlah lokasi pemeliharaan tanaman dekorasi	65 lokasi	0	0	65 lokasi	5,464,761,885	65 lokasi	6,266,820,230	65 lokasi	7,197,084,288	65 lokasi	8,277,278,559	65 lokasi	27,205,944,962	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Penyelenggaraan dan Partisipasi dalam Acara-acara Kedinasan	Jumlah penyelenggaraan acara-acara kedinasan	3 kali	3 kali	1,436,408,174	3 kali	1,744,203,885	3 kali	1,862,948,635	3 kali	1,991,067,860	3 kali	2,129,499,007	3 kali	9,164,127,561	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pembayaran Santunan Asuransi akibat Bencana Pohon Tumbang	Jumlah klaim santunan asuransi yang terbayarkan akibat bencana pohon tumbang	289 klaim	40 klaim	750,000,000	40 klaim	825,000,000	40 klaim	825,000,000	40 klaim	998,250,000	40 klaim	998,250,000	489 klaim	4,396,500,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pengamanan, Patroli Pengawasan dan Pengendalian Terpadu RTH Taman	Jumlah personel pengamanan RTH Taman	369	355 orang	16,794,964,705	382 orang	20,651,273,186	420 orang	22,556,373,660	462 orang	24,662,011,026	508 orang	26,968,185,284	508 orang	111,632,807,861	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Penanganan dan Penyelesaian Kasus di RTH Taman	Jumlah kasus RTH taman yang tertangani dan terselesaikan	17 kasus	10 kasus	233,506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 kasus	233,506,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pelatihan Pertamanan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan pertamanan	341 orang	0	0	800 orang	269,903,040	800 orang	296,893,344	800 orang	326,582,678	800 orang	359,240,946	3.541 orang	1,252,620,009	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kehutanan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan oleh Dinas Kehutanan	741 orang	0	0	500 orang	168,689,400	500 orang	185,558,340	500 orang	204,114,174	500 orang	224,525,591	2.000 orang	782,887,505	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Penggalangan Kemitraan dan Kerjasama	Jumlah kegiatan Penggalangan Kemitraan dan Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan	0	0	0	11 kali	385,000,000	11 kali	423,500,000	11 kali	465,850,000	11 kali	512,435,000	44 kali	1,786,785,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
	Pembuatan Media Publikasi Dinas Kehutanan	Jenis media publikasi Dinas Kehutanan yang dibuat	7 jenis	0	0	6 jenis	218,885,750	5 jenis	185,774,325	5 jenis	204,351,758	5 jenis	224,786,933	5 jenis	833,798,766	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

		Pelaksanaan Patroli Pengawasan Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota, dan TPU di Wilayah DKI Jakarta	Jumlah petugas Patroli Pengawasan Taman, Jalur Hijau, Hutan Kota, dan TPU di Wilayah DKI Jakarta	25 orang	36 orang	1,804,832,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 orang	1,804,832,028	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Hutang Daerah Perbaikan Pagar Taman Tebet Sisi Utara dan Sisi Selatan, Jakarta Selatan	Jumlah lokasi kegiatan yang terbayarkan hutang daerahnya	0	1 lokasi	1,746,444,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 lokasi	1,746,444,730	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta	Jumlah dokumen Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta yang tersusun	0	1 dokumen	54,586,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	54,586,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Jenis Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau yang diadakan	0	10 jenis	2,513,854,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 jenis	2,513,854,651	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan Dinas Kehutanan	Jumlah dokumen kebijakan Dinas Kehutanan yang tersusun	0	1 dokumen	513,980,750	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000	0	0	0	0	0	3 dokumen	1,513,980,750	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penataan Elemen Tata Hias Kota	Jumlah unit elemen tata hias kota yang tertata	0	0	0	7 unit	3,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7 unit	3,500,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyusunan Kebijakan di Bidang Pertamanan	Jumlah dokumen kebijakan di Bidang Pertamanan yang tersusun	0	0	0	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	0	4 dokumen	800,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Penambahan Rasio RTH																
--	---	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Program Pengelolaan Pemakaman	Penambahan Rasio RTH Makam	0.013%	0.014%	418,833,985,766	0.0046%	159,787,932,421	0.0046%	188,845,271,090	0.0046%	223,703,670,428	0.0046%	265,523,297,817	0.045%	1,256,694,157,523	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Makam	Luas lahan untuk RTH makam yang dibebaskan	8,41 Ha	8,89 Ha	400,000,000,000.00	3 Ha	138,520,800,000.00	3 Ha	166,224,960,000	3 Ha	199,469,952,000	3 Ha	239,363,942,400.00	29,3 Ha	1,143,579,654,400	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pembangunan RTH Makam	Luas RTH makam yang dibangun	1,95 Ha	0	0	11,09 Ha	12,367,132,421	11,14 Ha	12,420,311,090	11,19 Ha	12,473,718,428	11,24 Ha	12,527,355,417	46,61 Ha	49,788,517,357	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pembangunan Lampu Makam	Jumlah titik lampu yang terbangun di RTH makam	0	80 titik	12,100,607,548.00	40 titik	6,500,000,000	40 titik	7,800,000,000	40 titik	9,360,000,000	40 titik	11,232,000,000	240 titik	46,992,607,548	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pembangunan Pagar RTH Makam	Panjang pagar RTH makam yang terbangun	0	4.325 m'	6,733,378,218	2.000 m'	2,400,000,000	2.000 m'	2,400,000,000	2.000 m'	2,400,000,000	2.000 m'	2,400,000,000	12.325 m'	16,333,378,218	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
			Persentase lokasi RTH Makam yang terpelihara	83%	88%	0	89%	142,715,335,132	90%	153,503,118,946	90%	165,256,912,306	91%	178,104,276,951	91%	639,579,643,336	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pemeliharaan RTH Makam	Jumlah RTH makam yang terpelihara	82 lokasi	0	0	82 lokasi	68,440,955,597	82 lokasi	74,185,051,457	82 lokasi	80,503,556,102	82 lokasi	87,453,911,612	82 lokasi	310,583,474,768	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penataan RTH Makam	Jumlah RTH makam yang ditata	22 lokasi	0	0	20 lokasi	53,926,059,256	16 lokasi	57,164,915,181	17 lokasi	60,644,969,199	18 lokasi	64,386,206,745	71 lokasi	236,122,150,381	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengamanan, Patroli Pengawasan dan Pengendalian Terpadu RTH Makam	Jumlah personel pengamanan RTH makam	282 orang	0	0	360 orang	20,148,320,280	396 orang	21,953,152,308	435 orang	23,908,387,005	478 orang	26,064,158,594	478 orang	92,074,018,187	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyusunan Kebijakan di Bidang Pemakaman	Jumlah dokumen kebijakan di Bidang Pemakaman yang tersusun	0	0	0	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	800,000,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

Meningkatnya iklim kerja aparatur Dinas Kehutanan	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur Dinas Kehutanan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor															
		Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	4	152,393,760,892	4	107,745,009,922	4	115,625,174,472	4	124,124,742,687	4	133,468,347,985	4	633,357,035,959	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

		Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Penyediaan jasa telepon, air, listrik dan internet (TALI) per tahun	1 tahun	1 tahun	33,255,776,769	1 tahun	36,103,583,683	1 tahun	38,127,158,457	1 tahun	40,271,001,530	1 tahun	42,668,160,271	1 tahun	190,425,680,711	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor per tahun	1 tahun	1 tahun	5,669,054,492	1 tahun	5,927,994,194	1 tahun	6,239,920,079	1 tahun	6,572,720,526	1 tahun	6,925,992,090	1 tahun	31,335,681,380	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan per tahun	43 jenis	43 jenis	757,882,388	43 jenis	753,036,678	43 jenis	801,776,898	43 jenis	853,612,968	43 jenis	908,790,563	43 jenis	4,075,099,496	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan per tahun	14 jenis	14 jenis	330,357,803	14 jenis	419,336,718	14 jenis	449,179,021	14 jenis	480,925,986	14 jenis	514,739,101	14 jenis	2,194,538,628	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyediaan Sewa Mesin Fotocopi	Jumlah unit mesin fotocopi yang disewa per tahun	8 unit	8 unit	367,921,620	8 unit	402,499,207	8 unit	431,990,891	8 unit	463,418,832	8 unit	496,951,009	8 unit	2,162,781,559	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kerja kantor yang disediakan per tahun	53 jenis	53 jenis	2,821,845,723	53 jenis	2,958,683,766	53 jenis	3,150,999,437	53 jenis	3,354,480,530	53 jenis	3,620,112,510	53 jenis	15,906,121,967	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman per tahun	1 tahun	1 tahun	783,508,110	1 tahun	683,349,793	1 tahun	728,843,757	1 tahun	777,295,066	1 tahun	828,944,853	1 tahun	3,801,941,579	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis jasa administrasi keuangan yang disediakan per tahun	2 jenis	2 jenis	120,917,550	2 jenis	185,052,450	2 jenis	200,625,164	2 jenis	216,949,522	2 jenis	234,088,909	2 jenis	957,633,595	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pemeliharaan untuk Perbaikan Sarana Prasarana, Penyiraman dan Pengangkutan	Jumlah PHL pemeliharaan untuk perbaikan sarana prasarana, penyiraman dan pengangkutan	600 orang	600 orang	32,587,244,950	600 orang	34,383,154,811	600 orang	37,665,136,768	600 orang	41,248,750,245	600 orang	45,164,080,059	600 orang	191,048,366,833	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

		Pengadaan Bahan Bangunan untuk Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Dinas Kehutanan	Jenis bahan bangunan yang disediakan untuk perbaikan sarana dan prasarana gedung Dinas Kehutanan	47 jenis	47 jenis	5,827,425,117	47 jenis	6,780,016,972	47 jenis	7,262,695,150	47 jenis	7,779,160,926	47 jenis	8,332,654,765	47 jenis	35,981,952,930	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pendayagunaan Pekerja Harian Lepas Bidang Teknis	Jumlah PHL bidang teknis yang didayagunakan	204 orang	204 orang	10,227,381,492	0	0	0	0	0	0	0	0	204 orang	10,227,381,492	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengamanan Gedung Kantor, Gudang Barang, Bengkel Pool Kendaraan, Sarana Keindahan Kota, Area Buper Ragunan dan Kebun Bibit Dinas Kehutanan	Jumlah personel Pengamanan Gedung Kantor, Gudang Barang, Bengkel Pool Kendaraan, Sarana Keindahan Kota, Area Buper Ragunan dan Kebun Bibit Dinas Kehutanan	54 orang	105 orang	5,264,093,415	115 orang	5,765,435,645	126 orang	6,316,912,098	138 orang	6,918,522,774	151 orang	7,570,267,673	151 orang	31,835,231,605	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pembuatan Sertifikasi Tanah Aset Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta	Luas lahan aset Dinas Kehutanan yang tersertifikasi	0 Ha	20 Ha	179,200,000	20 Ha	200,000,000	100 Ha	979,200,000	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta						
		Penataan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Aset Dinas Kehutanan	Jumlah lokasi sarana prasarana gedung kantor dan aset Dinas Kehutanan yang tertata	3 lokasi	4 lokasi	2,516,988,973	2 lokasi	3,000,000,000	12 lokasi	14,516,988,973	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta						
		Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan untuk Perawatan Ruang Terbuka Hijau	Jenis pakaian kerja dan kelengkapan perawatan RTH yang diadakan	15 jenis	15 jenis	12,145,945,658	0	0	0	0	0	0	0	0	15 jenis	12,145,945,658	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Perawatan Taman dan Makam	Jenis peralatan dan perlengkapan kerja perawatan taman dan makam yang diadakan	103 jenis	103 jenis	16,528,943,346	0	0	0	0	0	0	0	0	103 jenis	16,528,943,346	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jenis peralatan dan perlengkapan kerja yang terpelihara	18 jenis	18 jenis	1,771,083,807	0	0	0	0	0	0	0	0	18 jenis	1,771,083,807	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pemeliharaan untuk Perbaikan Sarana Prasarana, Penyiraman dan Pengangkutan	Jumlah Petugas Pemeliharaan untuk Perbaikan Sarana Prasarana, Penyiraman dan Pengangkutan	266 orang	266 orang	13,335,703,318	0	0	0	0	0	0	0	0	266 orang	13,335,703,318	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengamanan Kawasan TMR	Jumlah personel Pengamanan Kawasan TMR	100 orang	100 orang	5,013,422,300	0	0	0	0	0	0	0	0	100 orang	5,013,422,300	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Petugas Pelayanan Pengunjung TMR	Jumlah Petugas Loket Pelayanan Pengunjung TMR	32 orang	32 orang	1,604,295,136	0	0	0	0	0	0	0	0	32 orang	1,604,295,136	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan TMR	Jenis Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan TMR yang tersedia	17 jenis	17 jenis	1,284,768,925	0	0	0	0	0	0	0	0	17 jenis	1,284,768,925	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	Jumlah PHL teknis yang tersedia	204 orang	0	0	204 orang	10,182,866,005	204 orang	11,049,936,752	204 orang	11,987,903,781	204 orang	13,003,566,182	204 orang	46,224,272,720	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

Meningkatnya iklim kerja aparatur Dinas Kehutanan	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur Dinas Kehutanan		Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional															
		Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	3	3	68,346,092,270	3	66,368,359,414	3	72,379,901,954	3	75,897,367,010	3	84,024,320,164	3	367,016,040,812	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Khusus	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Khusus yang diadakan	7 unit	57 unit	23,863,495,509	39 unit	17,277,425,473	47 unit	19,784,051,011	46 unit	19,512,837,618	56 unit	23,539,806,962	245 unit	103,977,616,573	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyediaan BBM KDO/ KDO Khusus	Jumlah BBM KDO/ KDO Khusus yang tersedia per tahun	1 tahun	1 tahun	23,803,755,674	1 tahun	26,471,251,373	1 tahun	28,254,973,512	1 tahun	30,190,246,309	1 tahun	32,292,036,043	1 tahun	141,012,262,911	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

		Penyediaan BBM Peralatan Kerja	Penyediaan BBM Peralatan Kerja per tahun	1 tahun	1 tahun	10,662,055,128	1 tahun	11,689,457,137	1 tahun	12,530,207,881	1 tahun	13,436,303,922	1 tahun	14,414,095,296	1 tahun	62,732,119,364	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyediaan Jasa Perizinan KDO/ KDO Khusus	Jumlah unit KDO/KDO khusus yang terurus perizinannya	24 unit	570 unit	713,110,310	570 unit	754,764,956	570 unit	822,917,282	570 unit	895,218,632	570 unit	972,050,599	570 unit	4,158,061,779	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta
		Penyediaan Jasa Service Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaiki secara rutin/berkala per tahun	1 tahun	1 tahun	9,303,675,649	1 tahun	10,175,460,475	1 tahun	10,987,752,268	1 tahun	11,862,760,528	1 tahun	12,806,331,265	5 tahun	55,135,980,185	Dinas Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta

BAB 7

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kehutanan



Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator kinerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Target Kinerja Dinas Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Target Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

Kinerja	Indikator Kinerja	kondisi awal periode RPJMD	Target					kondisi akhir periode RPJMD
			0	1	2	3	4	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pemakaman	80%	80%	82%	83%	85%	87%	87%
Meningkatnya jumlah fauna yang dikonservasi	Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	2132 fauna	2142	2152	2162	2172	2182	2182
Meningkatnya jumlah flora yang dikonservasi	Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	52.733 flora	52753	52773	52793	52813	52833	52833
Meningkatnya kuantitas RTH hutan	Penambahan Rasio RTH Hutan	0.024%	0.0085%	0.0115%	0.0115%	0.0115%	0.0115%	0.079%
Meningkatnya kualitas RTH hutan	Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara	93%	95%	95%	96%	97%	97%	97%
Meningkatnya kuantitas RTH Taman	Penambahan Rasio RTH Taman	0.139%	0.044%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.259%
Meningkatnya kualitas RTH Taman	Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%

Meningkatnya kuantitas RTH Makam	Penambahan Rasio RTH Makam	0.013%	0.014%	0.0046%	0.0046%	0.0046%	0.0046%	0.045%
Meningkatnya kualitas RTH Makam	Persentase lokasi RTH Makam yang terpelihara	83%	88%	89%	90%	90%	90%	91%

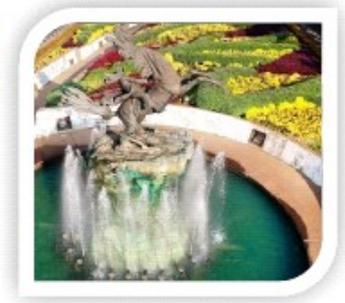
Dari beberapa kinerja Dinas Kehutanan yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan adalah seperti tabel dibawah ini:

Tabel 17. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

Kinerja	Indikator Kinerja	kondisi awal periode RPJMD	Target					kondisi akhir periode RPJMD
		0	1	2	3	4	5	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pemakaman	80%	80%	82%	83%	85%	87%	87%
Meningkatnya jumlah fauna yang dikonservasi	Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	2132 fauna	2142	2152	2162	2172	2182	2182
Meningkatnya jumlah flora yang dikonservasi	Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	52.733 flora	52753	52773	52793	52813	52833	52833
Meningkatnya kuantitas RTH hutan	Penambahan Rasio RTH Hutan	0.024%	0.0085%	0.0115%	0.0115%	0.0115%	0.0115%	0.079%
Meningkatnya kuantitas RTH Taman	Penambahan Rasio RTH Taman	0.139%	0.044%	0.019%	0.019%	0.019%	0.019%	0.259%
Meningkatnya kuantitas RTH Makam	Penambahan Rasio RTH Makam	0.013%	0.014%	0.0046%	0.0046%	0.0046%	0.0046%	0.045%

BAB 8

Penutup



Rencana Strategis (renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan periode 2017-2022 merupakan penjabaran visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Renstra Dinas Kehutanan ini merupakan sebuah dokumen yang wajib dijadikan sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan pada periode tersebut.

Dokumen Rencana Strategis (renstra) periode 2017 – 2022 ini memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, rencana kerja, program dan kegiatan serta indikator kinerja dinas kehutanan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta itu sendiri, dimana didalamnya sudah ditetapkan indikator dan target kinerja per tahunnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Dinas Kehutanan ini nantinya akan disahkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan, yang dalam pelaksanaannya harus selalu dilakukan pengawasan dan evaluasi. Hal ini dilakukan sebagai pengejawantahan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel dan sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Dinas Kehutanan dalam menjalankan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pada akhirnya, semoga Allah SWT memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga apa yang tercantum dalam rencana strategis SKPD yang diembankan kepada Dinas Kehutanan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membawa kebaikan untuk warga Jakarta yang kita cintai.

Jakarta, 30 Mei 2018
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi DKI Jakarta



Djafar Muchlisin, S.Sos, M.Si
NIP. 196805191989021001